



ASISTENSI PENATAAN ASET DESA CIBUGEL UNTUK TATA KELOLA ASET YANG LEBIH BAIK

Ali Tafriji Biswan^{1*}, Yanuar Fiskar Imapo², Akhdan Nur Prayoga³, Arga Emmir⁴, Sharah Puan Hany⁵

¹⁾ atb.biswan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²⁾ yanuar_4132230061@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 3082230017_akhdan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ 4111210013_arga@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁵⁾ 4111210020_sharah@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*untuk penulis korespondensi

Abstract

Village asset management plays a critical role in ensuring accountable and sustainable public service delivery at the grassroots level. However, Desa Cibugel in Tangerang Regency faces significant challenges in managing its village-owned assets, including incomplete documentation, weak inventory systems, and limited understanding among local officials regarding asset maintenance and related tax obligations. This community engagement project aimed to enhance asset governance by providing structured assistance in asset recording, labeling, maintenance scheduling, and the development of a basic asset monitoring dashboard using digital tools. The methodology consisted of four stages: initial observation, solution design, on-site implementation, and evaluation. Key outputs included inventory and maintenance cards, a monitoring spreadsheet, and a Google Sites-based dashboard tailored to the village's needs. The intervention resulted in improved awareness among village officials regarding asset accountability and demonstrated a practical, low-cost model for achieving administrative order in asset management. The project shows that university-community collaboration can significantly contribute to optimizing village governance, especially when reinforced with contextualized tools and participatory methods.

Keywords: Administrative accountability, Asset management, Community service, SIPADES, Village governance

Abstrak

Pengelolaan aset desa merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan. Namun, di Desa Cibugel, Kabupaten Tangerang, masih ditemukan berbagai kendala seperti lemahnya pencatatan aset, kurangnya pemahaman siklus pengelolaan aset, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan asistensi dalam penatausahaan aset melalui pemetaan masalah, pendataan ulang aset, pelabelan, serta penyusunan kartu inventaris dan pemeliharaan. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, penyusunan solusi, implementasi lapangan, dan evaluasi. Luaran kegiatan meliputi format kartu pemeliharaan, *database monitoring* aset, serta *dashboard* sederhana melalui *platform Google Sites*. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman perangkat desa terhadap prinsip dasar penataan aset, kesadaran terhadap kewajiban pemeliharaan dan pajak aset, serta dokumentasi aset yang lebih tertib. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan berbasis kolaboratif antara perguruan tinggi dan desa dapat memperkuat tata kelola aset desa secara signifikan.

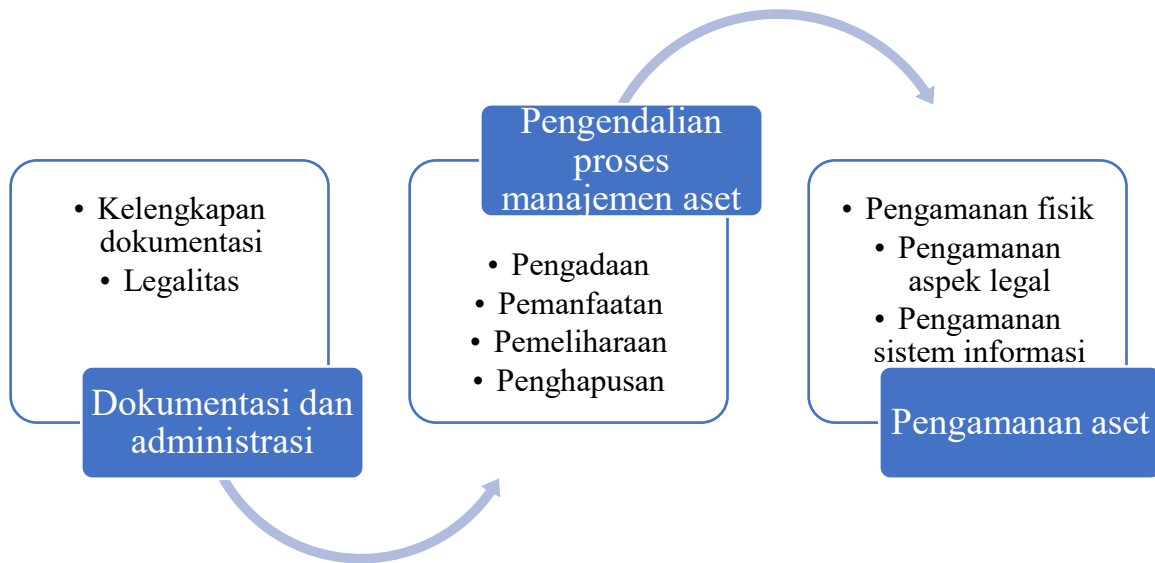
Kata Kunci: Penataan aset, Pengabdian masyarakat, Pengelolaan aset desa, SIPADES, Tata kelola desa

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset desa merupakan salah satu elemen krusial dalam tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Aset desa, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, maupun infrastruktur lainnya, memiliki fungsi strategis sebagai pendukung utama layanan publik dan modal pembangunan berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, aset desa tidak hanya harus dicatat dan dijaga, tetapi juga dikelola secara tertib melalui proses pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan sesuai regulasi yang berlaku. Berikut ini gambaran tata kelola manajemen aset publik, termasuk aset desa.



Gambar 1 Tata Kelola Manajemen Aset Publik



Sumber: Diolah dari beragam sumber (Biswan, 2024; Lestari et al., 2024; Novita, 2020).

Gambar tersebut menunjukkan tiga tahapan utama dalam pengelolaan aset. Pertama, dokumentasi dan administrasi memastikan kelengkapan dokumen dan legalitas aset. Kedua, pengendalian proses manajemen aset mencakup kegiatan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Ketiga, pengamanan aset mencakup perlindungan fisik, legal, dan sistem informasi untuk menjaga aset tetap aman.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya aset desa telah menjadi perhatian penting pemerintah. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) untuk membantu desa melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan pelaporan aset secara digital. SIPADES mulai diterapkan secara nasional sejak 2018, dan diperbarui ke versi 3.0 dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasinya di lapangan masih menunjukkan tantangan besar.

Studi menunjukkan bahwa penerapan SIPADES seringkali terbentur pada keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan teknis, serta infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai (Maarif et al., 2024; Prayitno, 2021; Rachman et al., 2024). Di banyak desa, proses pencatatan masih dilakukan secara manual, dan belum terintegrasi dengan sistem digital secara konsisten. Hal ini juga diperkuat studi yang menemukan bahwa perangkat desa kerap kesulitan mengoperasikan SIPADES akibat tidak tersedianya SOP pelatihan internal yang sistematis (Adheitya Widaniyansyah et al., 2024). Namun demikian, beberapa desa sudah mulai menata aset baik administrasi maupun pengamanannya (Friyanto and Haritsar, 2023; Marsus et al., 2019). Untuk penataan yang sudah sesuai, tantangannya lebih pada optimalisasi aset desa (Arfah et al., 2025; Arifin, 2024; Novriansa et al., 2023).

Kesenjangan lainnya adalah tidak adanya sistem pelabelan fisik dan dokumentasi pemeliharaan aset (Maletič et al., 2023; Tyler, 2016). Dalam studi kasus di Desa Karangjaladri, Pangandaran, ditemukan bahwa sebagian besar aset desa tidak memiliki kode inventaris fisik, sehingga menyulitkan proses audit maupun pelacakan saat terjadi penggantian atau kerusakan (Hidayat and Nursetiawan, 2022). Ini mencerminkan pentingnya sistem pencatatan, juga manajemen aset secara visual dan administratif (Kushartono et al., 2022).



Dalam konteks digitalisasi, studi menekankan bahwa aplikasi aset desa dapat mengelola seluruh aset yang ada agar lebih mudah dipantau, dikelola dan ditelusuri (Hidayah et al., 2022). Keberhasilan pengelolaan aset desa berbasis aplikasi sangat bergantung pada pendekatan yang kontekstual. Artinya, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi desa. *Google Sites*, *Excel* berbasis *cloud*, maupun format *offline* sering kali menjadi solusi praktis sebelum desa siap sepenuhnya mengadopsi SIPADES.

Di sisi lain, pengelolaan aset juga berkaitan erat dengan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Sepia Prilly et al. (2022) menilai bahwa banyak pemerintah desa tidak menyadari pentingnya pelaporan pajak aset, termasuk atas pengadaan kendaraan, bangunan, dan PPh perangkat desa. Akibatnya, banyak aset tidak tercatat secara fiskal, sehingga berpotensi menimbulkan masalah dalam akuntabilitas dan hubungan dengan otoritas pajak.

Berpijak dari kondisi umum tersebut, Desa Cibugel di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, menjadi contoh konkret tantangan pengelolaan aset di tingkat desa. Meskipun aplikasi SIPADES 3.0 telah tersedia, penggunaannya belum optimal karena belum adanya data terintegrasi dari versi sebelumnya. Pelabelan aset belum dilakukan, kartu inventaris belum tersedia, dan dokumentasi pemeliharaan tidak ditemukan. Selain itu, pemahaman perangkat desa terkait siklus aset dan kewajiban perpajakan pun masih perlu pengembangan.

Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar aset desa, seperti komputer, kendaraan roda dua, dan alat perkantoran masih disimpan tanpa identifikasi kode atau pencatatan. Inventarisasi terakhir dilakukan pada tahun 2018, dan belum diperbarui sejak masa pandemi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa stagnasi dokumentasi aset sering terjadi ketika tidak ada sistem pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten (Nugroho, 2020).

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pendampingan yang tidak hanya berbasis sosialisasi normatif, tetapi juga pada praktik langsung (*learning by doing*). Pendampingan seperti ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa, sebagaimana diungkap suatu studi yang melakukan pelatihan serupa di Sumatera Selatan (Novriansa et al., 2023). Selain memberikan pemahaman teknis, pendekatan ini juga mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap aset publik.

Kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menjawab kesenjangan tersebut dengan menyusun solusi partisipatif dan aplikatif. Pendekatan meliputi identifikasi permasalahan, pelabelan aset, penyusunan kartu inventaris dan pemeliharaan, pelatihan perpajakan, serta pengembangan *dashboard monitoring* digital berbasis *Google Sites*. Diharapkan intervensi ini dapat menjadi model penguatan sistem tata kelola aset desa yang tertib, transparan, dan mudah direplikasi khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang bertumpu pada pemecahan masalah nyata di lapangan melalui keterlibatan aktif perangkat desa. Pendekatan ini relevan mengingat pengelolaan aset desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan keberlanjutan praktik yang konsisten. Oleh karena itu, metode pelaksanaan dirancang tidak hanya untuk menyampaikan materi, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk kebiasaan kerja tertib dalam tata kelola aset.

Secara umum, kegiatan ini dilaksanakan dalam empat tahapan utama, yaitu: (1) observasi dan identifikasi masalah, (2) perancangan solusi dan penyusunan alat bantu, (3) implementasi dan pelatihan lapangan, serta (4) evaluasi dan penyerahan luaran. Berikut ini ikhtisar tahapan.



Tabel 1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Dalam Pendampingan Penataan Aset Desa

Tahap	Uraian Kegiatan
1. Observasi dan identifikasi masalah	Pengumpulan data awal melalui observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa (Kaur Umum, Operator Aset), dan penelaahan dokumen inventaris. Disusun matriks masalah sebagai dasar intervensi.
2. Perancangan solusi dan alat bantu	Penyusunan format administrasi seperti kartu inventaris ruangan, kartu pemeliharaan aset, <i>spreadsheet</i> aset, label aset, serta desain <i>dashboard monitoring</i> aset berbasis <i>Google Sites</i> .
3. Implementasi dan pelatihan lapangan	Pendataan ulang aset fisik, pelabelan aset secara langsung, pelatihan pengisian kartu, dan penggunaan dashboard digital. Pelatihan dilakukan dengan metode simulasi langsung di Kantor Desa.
4. Evaluasi dan penyerahan luaran	Evaluasi keterpahaman dan kebermanfaatan alat bantu melalui diskusi bersama perangkat desa. Penyerahan modul, poster, dokumen inventaris, dan <i>dashboard</i> sebagai luaran kegiatan.

Tahap pertama adalah observasi dan identifikasi masalah. Kegiatan ini dilakukan melalui kunjungan lapangan, wawancara dengan perangkat desa, serta penelaahan dokumen administrasi aset yang dimiliki desa. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada tiga perangkat desa, yaitu Kaur Umum, Kaur Keuangan, dan Operator Aset, yang dipilih secara purposive berdasarkan peran mereka dalam pengelolaan aset. Setiap wawancara berlangsung selama kurang lebih 30–45 menit, dengan topik mencakup pencatatan aset, pemahaman terhadap SIPADES, dan kewajiban perpajakan. Proses ini dilakukan pada tanggal 12–14 di Kantor Desa Cibugel. Hasil wawancara direkam dalam catatan dan digunakan sebagai dasar penyusunan matriks permasalahan. Bersamaan dengan itu, tim juga meninjau kondisi pencatatan aset fisik, pelabelan, serta pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait aset desa. Informasi dari observasi ini digunakan sebagai dasar penyusunan matriks permasalahan.

Tahap kedua adalah perancangan solusi dan penyusunan alat bantu. Berdasarkan temuan di tahap awal, tim menyusun berbagai instrumen pendukung penataan aset, antara lain: (a) format kartu inventaris ruangan, (b) kartu pemeliharaan untuk peralatan dan kendaraan, (c) *spreadsheet monitoring* pajak dan pemeliharaan aset, serta (d) label aset dengan kode klasifikasi. Selain itu, tim juga merancang *dashboard* digital berbasis *Google Sites* untuk memudahkan pemantauan data aset secara visual, fleksibel, dan dapat diperbarui oleh perangkat desa secara mandiri.

Tahap ketiga adalah implementasi dan pelatihan lapangan. Pada tahap ini, tim melakukan pendataan ulang aset dari Buku Inventaris Barang tahun 2018–2023 serta tambahan data aset tahun 2024. Pendataan dilakukan ke dalam *spreadsheet* sesuai format SIPADES untuk mempermudah proses integrasi ke sistem resmi. Kemudian, dilakukan pelabelan aset secara fisik di ruangan-ruangan prioritas seperti ruang Kepala Desa dan ruang rapat. Tim juga memandu perangkat desa dalam pengisian kartu inventaris dan kartu pemeliharaan. Selanjutnya, dilakukan pelatihan penggunaan dashboard digital, termasuk bagaimana cara memperbarui data, memantau jadwal pajak, dan mencetak dokumentasi.

Tahap keempat adalah evaluasi dan penyerahan luaran. Evaluasi dilakukan melalui forum diskusi reflektif bersama perangkat desa. Dalam sesi ini, tim menggali respon atas kemudahan penggunaan alat bantu, kesiapan operasional desa dalam melanjutkan praktik yang telah diterapkan, serta tantangan yang masih dihadapi. Setelah itu, seluruh dokumen



pendukung seperti format, modul, infografis aset, dan salindia diserahkan kepada pihak desa untuk dijadikan rujukan berkelanjutan. Dokumentasi juga diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui tim sebagai bentuk pelaporan formal kegiatan pengabdian.

Pendekatan metode ini menekankan prinsip *learning by doing* dan *problem solving*, di mana perangkat desa tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga terlibat langsung dalam praktik inventarisasi, pelabelan, serta pembentukan sistem dokumentasi. Dengan metode ini, diharapkan penguatan kapasitas perangkat desa berlangsung secara berkelanjutan, serta menjadi fondasi bagi praktik tata kelola aset yang lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Awal dan Kebutuhan Pendampingan

Pengelolaan aset desa di Desa Cibugel menunjukkan sejumlah permasalahan sistemik yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan akuntabilitas keuangan desa. Berdasarkan diskusi awal bersama perangkat desa, tim pengabdian mengidentifikasi bahwa SIPADES versi 3.0 belum terakses optimal karena kendala transisi sistem dari versi sebelumnya. Banyak aset baru hasil pengadaan maupun hibah tidak terdokumentasi secara tepat. Selain itu, kodefikasi dan pelabelan fisik aset belum tersedia, kartu inventaris dan pemeliharaan belum pernah dibuat, serta pemahaman perangkat desa terkait pajak atas aset dan kewajiban administrasi masih rendah.

Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan sistem pengelolaan aset dengan kesiapan kapasitas lokal untuk mengimplementasikannya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kehilangan aset, kesalahan pelaporan, dan rendahnya transparansi publik.

Tahapan Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan pengelolaan aset desa di Desa Cibugel dilaksanakan melalui enam tahapan utama yang sistematis, dimulai dari proses identifikasi hingga tahap evaluasi dan serah terima luaran. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab permasalahan spesifik yang dihadapi pemerintah desa, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis praktik langsung.

Penatausahaan dan pengelolaan aset desa pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan sebuah desa. Pada gilirannya, aset memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Di samping hal tersebut, aset dapat dikapitalisasi guna memberikan manfaat ekonomi berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menyerap tenaga kerja yang mendorong produktivitas masyarakat desa. Penting untuk diingat bahwa setiap aset tetap memerlukan penanganan khusus yang bersinggungan dengan aspek sumber daya manusia yang lazim dikenal sebagai operator atau manajer aset. Namun demikian, minimnya kesadaran dan pengetahuan terkait siklus pengelolaan aset menghambat upaya tertib administrasi dan efisiensi pelayanan. Hal ini juga diperparah dengan kondisi lemahnya pencatatan terkait pengadaan aset sehingga sumber, tahun, dan harga perolehan acapkali tidak tersedia. Oleh karena itu, program ini dirancang dalam upaya penguatan pelaksanaan siklus pengelolaan aset baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas dokumentasi yang tersedia sehingga aset dapat memberikan produktivitas tertinggi dengan tetap memperhatikan aspek akuntabilitas.



Gambar 2 Kegiatan Identifikasi Permasalahan Dalam Pengelolaan Aset



Adapun program ini dimulai dengan memetakan permasalahan dalam pengelolaan aset dengan melakukan diskusi bersama perangkat desa, yaitu kepala urusan umum dan operator aset. Dari diskusi didapatkan informasi bahwa belum tersedianya sarana dokumentasi yang memadai untuk mencatat adanya pemeliharaan maupun penatausahaan aset per ruangan. Selain itu, beberapa perangkat desa dalam menggunakan aset tidak disertai dengan pemahaman terkait kewajiban perpajakan terkait aset dan pemeliharaan rutin maupun korektif. Berdasarkan observasi yang dilakukan, kodefikasi dan pelabelan aset sebagai bagian dari siklus penatausahaan relatif masih lemah. Informasi-informasi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam matriks permasalahan untuk didiskusikan sebab, kondisi terkini, dan solusi.

Gambar 3 Kegiatan Menyusun Matriks Permasalahan Tata Kelola Aset Desa



Setelah matriks permasalahan disusun, tim melakukan pengumpulan data dari Buku Inventaris Barang dari tahun 2018–2023 yang bersumber dari SIPADES 2.0. dan dari pencatatan manual perangkat desa untuk aset yang diadakan tahun 2024. Pengumpulan data ini dilakukan dalam aplikasi *spreadsheet* untuk diidentifikasi kode lokasi dan kode barang berdasarkan jenis barang dan tahun perolehan. Setelah itu berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, dibuat format label atas seluruh aset desa cibugel yang dapat dilekati dengan label. Akan tetapi, pencetakannya hanya dilakukan pada ruangan Kepala Desa dan ruang rapat.



Gambar 4 Kegiatan Inventarisasi Aset



Dalam menangani permasalahan penatausahaan dan pengelolaan aset khususnya mengenai pencatatan aset dalam suatu ruangan dan pemeliharaan, tim memberikan solusi berupa pembuatan format kartu inventaris ruangan dan kartu pemeliharaan. Untuk memberikan contoh pengisian kartu inventaris ruangan, tim melakukan inventaris barang di ruang Kepala Desa dengan mengonfirmasi kepada Kaur Umum sebagai penanggung jawab ruangan. Untuk kartu pemeliharaan, disediakan dua format terpisah berdasarkan jenis aset, yaitu kartu pemeliharaan untuk peralatan dan mesin serta kartu pemeliharaan untuk kendaraan.

Untuk menangani permasalahan terkait keterlambatan pembayaran pajak terkait aset serta memastikan pemeliharaan yang dilakukan *on track*, tim menyusun sebuah program *spreadsheet* sebagai *monitoring* pembayaran pajak dan pemeliharaan yang berisikan nama dan identitas barang yang dilengkapi dengan jadwal dan jatuh tempo kegiatan yang harus dilakukan



pengguna aset. Dalam upaya meningkatkan rasa kepemilikan bersama dan bentuk akuntabilitas pada masyarakat, disusun pula infografis mengenai kekayaan aset Desa Cibugel yang berisi informasi tentang jenis aset desa beserta proporsinya terhadap keseluruhan aset Desa Cibugel.

Puncak dari kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh perangkat/operator desa di Desa Cibugel mengenai pengelolaan dan penatausahaan aset dengan menggunakan bahan tayang yang telah disiapkan. Kemudian, dilanjutkan dengan asistensi akhir operasi *dashboard* pengelolaan aset desa yang disusun oleh tim. Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan, seluruh luaran berupa salindia yang telah disusun dan poster infografis diserahkan kepada bendahara Desa Cibugel untuk dijadikan referensi dalam pengelolaan aset di masa mendatang.

Gambar 5 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dan Penatausahaan Aset Desa



Gambar 6 Penyerahan Poster Infografis Aset Desa





Analisis Gap dan Cakupan Solusi

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) dilakukan untuk menilai sejauh mana permasalahan yang teridentifikasi pada awal kegiatan dapat diatasi melalui tahapan pendampingan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, ditemukan bahwa proses pengelolaan aset di Desa Cibugel mengalami kekosongan pada hampir seluruh siklus manajemen aset, mulai dari pencatatan, pelabelan, pemeliharaan, hingga pelaporan perpajakan. Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga karena belum tersedianya sistem dan alat bantu kerja yang sesuai dengan kapasitas operasional di tingkat desa.

Salah satu kesenjangan utama adalah dalam aspek pendataan dan inventarisasi aset. Sebelum pendampingan dilakukan, pencatatan aset hanya bersumber dari Buku Inventaris Barang (BIB) versi lama yang tidak diperbarui sejak 2018. Data tersebut belum memuat aset yang diperoleh setelah pandemi COVID-19, termasuk aset bantuan dan hasil pengadaan tahun 2022–2023. Untuk menjawab *gap* ini, tim pengabdian melakukan pendataan ulang secara manual berbasis *spreadsheet*. Hasilnya menunjukkan bahwa aset yang selama ini tidak tercatat, seperti perangkat komputer, kipas angin, dan kursi rapat, berhasil didokumentasikan ulang. Proses ini memberikan dasar data yang lebih akurat dan siap diintegrasikan ke sistem SIPADES jika akses aplikasi telah memungkinkan.

Gap berikutnya terletak pada tidak tersedianya sistem pelabelan fisik terhadap aset desa. Kondisi awal menunjukkan bahwa aset di ruang Kepala Desa, ruang rapat, dan ruang layanan umum tidak memiliki identitas atau kode inventaris. Hal ini menyebabkan aset sulit dikenali status kepemilikannya dan rentan tidak tertelusur saat rotasi penggunaan. Melalui kegiatan pendampingan, tim membuat dan menempelkan label aset secara langsung pada masing-masing barang. Proses pelabelan ini tidak hanya menyederhanakan proses identifikasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran perangkat desa terhadap nilai dan fungsi aset yang mereka kelola.

Kesenjangan lain yang sangat krusial adalah tidak adanya format kartu pemeliharaan atau inventaris ruangan. Akibatnya, perangkat desa tidak memiliki catatan berkala tentang kondisi dan umur pakai barang, serta tidak ada dokumentasi jika terjadi perbaikan atau penggantian. Pendampingan menjawab hal ini dengan menyusun dua jenis kartu: kartu inventaris ruangan dan kartu pemeliharaan aset (untuk kendaraan dan peralatan). Perangkat desa dilatih mengisi kartu ini melalui simulasi langsung. Setelah pelatihan, mereka menyatakan siap mengisi kartu tersebut secara mandiri untuk aset-aset yang belum tercatat.

Dalam aspek digitalisasi dan pemantauan aset, kondisi awal menunjukkan ketiadaan sistem pemantauan aset desa secara daring atau terpadu. Meskipun aplikasi SIPADES telah tersedia, sistem tersebut belum digunakan karena belum adanya pelatihan dan data yang siap unggah. Untuk mengisi kekosongan ini, tim merancang *dashboard monitoring* berbasis *Google Sites* yang menampilkan daftar aset, tautan ke kartu pemeliharaan, jadwal pajak, dan dokumentasi aset secara visual. Solusi ini disesuaikan dengan kemampuan teknis perangkat desa dan kebutuhan informasi dasar yang relevan. *Dashboard* juga dapat menjadi solusi jangka menengah sampai aplikasi SIPADES sepenuhnya dapat digunakan secara aktif dan rutin.

Selanjutnya, dalam aspek perpajakan aset, ditemukan bahwa pemahaman perangkat desa terhadap kewajiban pajak, seperti PPh 21 untuk penghasilan perangkat dan PPN atas pengadaan barang, masih sangat terbatas. Dalam sesi pelatihan, tim pengabdian menyampaikan infografis dan kalender pajak desa sebagai media edukasi yang mudah dipahami. Setelah kegiatan, perangkat desa mengaku lebih memahami kapan dan bagaimana pajak aset harus dilaporkan dan dibayarkan. Sosialisasi ini juga mendorong keterlibatan bendahara desa dalam proses pengelolaan aset secara terpadu.



Terakhir, *gap* yang tidak kalah penting adalah pada partisipasi perangkat desa dalam proses pengelolaan aset. Sebelumnya, tanggung jawab pengelolaan hanya difokuskan pada satu atau dua perangkat, tanpa keterlibatan lintas bagian. Pendekatan pendampingan berbasis praktik dan kolaboratif yang dilakukan dalam kegiatan ini terbukti efektif untuk meningkatkan pelibatan seluruh perangkat, termasuk Kepala Dusun dan staf administrasi. Dengan pelatihan berbasis simulasi, para perangkat desa tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga mengalami secara langsung proses dokumentasi dan monitoring aset.

Dampak asistensi ini tercermin dari tanggapan langsung para perangkat desa yang terlibat. Selama sesi diskusi akhir, beberapa perangkat menyampaikan testimoni mereka atas proses dan hasil pendampingan. Kepala Desa Cibugel menyampaikan bahwa kegiatan asistensi dari mahasiswa PKN STAN ini sangat membantu perangkat desa dalam memahami urgensi penataan aset secara tertib dan akuntabel. Kepala Desa Cibugel menyampaikan, “Kami sangat terbantu. Banyak aset desa yang kurang terdata dengan baik, adik-adik (mahasiswa PKN STAN) sangat membantu dan pencatatan mulai tertib. Harapan kami, ini bisa terus diterapkan dan jadi kebiasaan baru di desa.”

Selain itu, Kaur Umum yang berperan langsung dalam pencatatan aset menyatakan bahwa pendekatan langsung yang dilakukan tim pengabdian memudahkan pemahaman. Kaur Umum juga mengungkapkan bahwa metode asistensi berbasis praktik langsung sangat membantu dalam memahami prosedur baru, seperti pengisian kartu pemeliharaan dan penggunaan *dashboard* aset. Sebelumnya, perangkat desa belum pernah menggunakan format-format tersebut. Namun, melalui asistensi yang dilakukan secara partisipatif, mereka merasa lebih mampu dan siap. Kaur Umum menyampaikan, “Awalnya kami bingung, belum pernah bikin kartu pemeliharaan atau *dashboard*. Tapi ini penting. Dan setelah diajari langsung, ternyata cukup mudah dan bisa kami ikuti. Harapannya kegiatan (asistensi) ini diteruskan, sehingga ke depannya kami lebih terpantau, kalau ada kendala bisa segera dibantu penyelesaiannya”. Operator aset desa juga menyampaikan peningkatan pemahaman setelah kegiatan berlangsung. Operator desa menyampaikan bahwa sebelumnya tidak ada pelabelan aset, sehingga tata usaha aset kurang tertib. Operator desa menyampaikan, “Saya dulu *nggak* ngerti kalau harus dilabel dan pakai kartu inventaris. Sangat terbantu diajari pakai *spreadsheet* untuk label barang, mudah juga. Sekarang bisa isi sendiri, dan tahu cara *nyimpan* datanya.”

Ketiga testimoni ini menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun motivasi perangkat desa untuk mengelola aset secara mandiri dan tertib.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh *gap* utama yang teridentifikasi pada awal kegiatan telah terjawab melalui pendampingan yang dirancang secara bertahap dan kontekstual. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa keberlanjutan dari solusi yang diberikan sangat tergantung pada komitmen internal pemerintah desa untuk menerapkan dan memperluas praktik yang telah diperkenalkan. Maka dari itu, disarankan adanya pembinaan lanjutan dari pemerintah kabupaten agar praktik ini dapat dijadikan model atau *best practice* di desa-desa lain dengan kondisi serupa. Berikut ini ikhtisar permasalahan, intervensi, hasil pendampingan.

Tabel 2 Ikhtisar Permasalahan, Intervensi, dan Hasil Pendampingan

No	Permasalahan	Kondisi Awal	Intervensi	Status Hasil
1	Inventarisasi	Manual, tidak lengkap	Pendataan ulang, labelisasi	Selesai untuk dua ruangan prioritas
2	Pemeliharaan	Tidak tersedia	Kartu pemeliharaan, pelatihan	Sudah diterapkan



3	Monitoring Aset	Tidak ada sistem	<i>Google Sites dashboard</i>	Sudah difungsikan
4	Perpajakan Aset	Pemahaman rendah	Sosialisasi, infografis pajak	Pemahaman meningkat
5	Pelibatan Perangkat	Terbatas, tidak merata	Pelatihan partisipatif	Seluruh perangkat dilibatkan

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh *gap* utama telah dijawab oleh kegiatan pendampingan, meskipun beberapa aspek seperti integrasi ke SIPADES resmi dan ekspansi pelabelan perlu keberlanjutan dari pihak desa dan pemangku kebijakan tingkat kabupaten.

Refleksi dan Implikasi

Kegiatan pendampingan pengelolaan aset desa di Desa Cibugel memberikan sejumlah pelajaran penting yang dapat dijadikan refleksi bersama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan penguatan kapasitas perangkat desa harus dilakukan secara kontekstual, tidak semata-mata melalui sosialisasi normatif atau pelatihan berbasis teori, tetapi dengan praktik langsung, pendampingan intensif, dan penyusunan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Refleksi utama yang muncul dari kegiatan ini adalah bahwa kesenjangan dalam pengelolaan aset desa bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan teknologi atau regulasi yang belum dipahami, melainkan juga oleh tidak adanya budaya administrasi yang tertib dan terstruktur di lingkungan desa. Dalam konteks Desa Cibugel, meskipun aplikasi SIPADES telah diperkenalkan dan bahkan tersedia secara daring, sistem tersebut tidak berfungsi optimal karena tidak adanya basis data yang terorganisir, serta belum tersedia SDM yang merasa memiliki tanggung jawab atas urusan inventarisasi dan pemeliharaan aset secara menyeluruh. Artinya, solusi tidak cukup dengan menyediakan sistem, tetapi harus diiringi dengan pembentukan ekosistem kerja yang tertib dan kolaboratif.

Kegiatan ini juga mencerminkan bahwa alat bantu sederhana seperti kartu inventaris, label aset, dan *dashboard* digital berbasis *Google Sites* dapat menjadi jembatan antara keterbatasan sistem digital resmi dan kebutuhan operasional harian desa. Pendekatan *low-tech* tetapi tepat guna ini terbukti efektif diterima oleh perangkat desa, karena mudah digunakan dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan internal. Pengalaman ini menunjukkan bahwa transformasi digital di desa harus berangkat dari kenyataan teknis dan kultural desa, bukan sekadar mengadopsi sistem dari atas ke bawah tanpa kesiapan.

Dari sisi sosial, kegiatan ini memberi dampak positif dalam membangun rasa kepemilikan (*ownership*) di kalangan perangkat desa terhadap aset yang dikelola. Selama proses pendampingan, terjadi peningkatan keterlibatan lintas perangkat, mulai dari Kepala Dusun, Kaur Umum, hingga staf administrasi lainnya. Ini merupakan pencapaian penting karena pengelolaan aset desa seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif, bukan dibebankan pada satu posisi jabatan saja. Kolaborasi ini juga membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antar perangkat desa dalam konteks transparansi dan tanggung jawab publik.

Dari sisi kebijakan, hasil kegiatan ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan model pelatihan atau pendampingan berbasis praktik di tingkat desa secara lebih luas, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki kebiasaan dokumentasi dan pelaporan tertulis secara konsisten. Pemerintah kabupaten atau provinsi dapat menggunakan pendekatan semacam ini sebagai model pelatihan replikasi, dengan adaptasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Luaran seperti modul pelatihan, kartu pemeliharaan, dan *dashboard* aset yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat dijadikan *template* standar yang dapat dikembangkan di desa lain.



Implikasi lebih lanjut dari kegiatan ini juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan desa. Dengan semakin meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya, desa dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan tidak hanya keuangan, tetapi juga seluruh aset yang diperoleh dari dana publik. Maka, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistemik untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai prinsip transparansi dan efisiensi, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Terakhir, dari sisi akademik, kegiatan ini menjadi bukti bahwa peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan desa tidak harus selalu bersifat konseptual, tetapi juga dapat berwujud pada fasilitasi teknis yang aplikatif dan langsung menysasar kebutuhan konkret. Keterlibatan tim dalam menyusun *dashboard*, melabeli aset, dan melakukan pelatihan juga menunjukkan sinergi nyata antara institusi pendidikan dan entitas pemerintahan desa.

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberi kontribusi tidak hanya dalam peningkatan kapasitas desa secara mikro, tetapi juga dapat menjadi referensi model intervensi pengelolaan aset desa yang dapat diadaptasi dalam program pembinaan desa lain, baik melalui jalur program pengabdian masyarakat, kemitraan strategis, maupun pelatihan dari pemerintah daerah.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengabdian ini berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Cibugel terkait pengelolaan aset desa. Berdasarkan temuan awal, terdapat sejumlah kendala utama seperti ketidakteraturan dalam pencatatan aset, tidak adanya pelabelan fisik yang memadai, serta keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai kewajiban perpajakan atas aset. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis praktik langsung, kegiatan ini telah berhasil memperkenalkan dan mengimplementasikan solusi-solusi sederhana namun efektif.

1. Pendataan dan Pelabelan Aset: Seluruh aset yang ada di ruang utama desa telah tercatat dengan baik dalam sistem spreadsheet yang mengacu pada format SIPADES. Selain itu, pelabelan aset telah dilakukan pada ruang Kepala Desa dan ruang rapat sebagai sampel.
2. Penyusunan Kartu Inventaris dan Pemeliharaan: Format kartu inventaris dan kartu pemeliharaan telah disusun dan dilatih penggunaannya kepada perangkat desa, yang kini telah dapat menggunakannya secara mandiri.
3. Pengembangan Dashboard Pengelolaan Aset: *Dashboard* berbasis *Google Sites* yang dirancang untuk memonitor aset secara digital berfungsi dengan baik, meskipun akan lebih optimal jika terintegrasi dengan SIPADES secara langsung di masa depan.
4. Sosialisasi Perpajakan Aset: Melalui sosialisasi yang dilakukan, perangkat desa kini memiliki pemahaman yang lebih baik terkait pajak atas aset desa, serta bagaimana cara mengelola kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan akurat.

Secara keseluruhan, program pengabdian ini telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutan praktik yang telah diimplementasikan, seperti pelatihan lebih lanjut mengenai pemanfaatan SIPADES dan integrasi penuh ke dalam sistem digital yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan langkah lanjutan untuk meningkatkan pengelolaan aset desa di Desa Cibugel maupun desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa:



1. Pelatihan dan Pembinaan Berkelanjutan. Meskipun perangkat desa telah dilatih dalam pengelolaan aset dasar, pelatihan berkala tetap diperlukan untuk memperkuat pemahaman tentang sistem pengelolaan aset berbasis teknologi, seperti penggunaan SIPADES dan pemeliharaan aset dengan lebih baik. Pemerintah Desa dapat mengadakan pelatihan lanjutan secara rutin untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.
2. Penguatan Sistem Digitalisasi. Meskipun *Google Sites* telah diimplementasikan sebagai solusi sementara, ke depannya integrasi SIPADES yang lebih baik dan penggunaan sistem berbasis *cloud* akan sangat membantu dalam memudahkan proses pencatatan dan pelaporan aset desa. Pemerintah desa sebaiknya mempercepat pengintegrasian SIPADES dengan perangkat keras dan koneksi internet yang lebih memadai, agar dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi sistem ini.
3. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi. Keterbatasan infrastruktur teknologi di desa, seperti koneksi internet yang lambat dan perangkat yang terbatas, menjadi hambatan dalam penggunaan sistem digital. Oleh karena itu, perlu adanya investasi dalam infrastruktur teknologi informasi di desa, baik melalui program pemerintah daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga (misalnya penyedia layanan internet atau perusahaan teknologi).
4. Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan. Setelah pelatihan dan implementasi sistem baru, evaluasi rutin harus dilakukan untuk memantau efektivitas penerapan sistem pengelolaan aset yang baru. Pemerintah desa perlu menetapkan mekanisme evaluasi dan pemantauan aset secara berkala, untuk memastikan bahwa aset desa tetap dikelola secara efektif dan akuntabel.
5. Penerapan Kebijakan Pengelolaan Aset Desa yang Lebih Terstruktur. Selain pelatihan dan digitalisasi, penting bagi Desa Cibugel untuk menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan aset desa yang lebih terstruktur dan komprehensif. SOP ini dapat mencakup prosedur inventarisasi, pelabelan, pemeliharaan, serta kewajiban perpajakan, sehingga seluruh perangkat desa memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya.
6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset desa juga sangat penting. Oleh karena itu, desa dapat melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan aset atau program pemberdayaan berbasis aset desa, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola aset desa untuk tujuan ekonomi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menjawab berbagai masalah yang ada di Desa Cibugel dalam hal pengelolaan aset. Dengan pendampingan yang berbasis praktik langsung, perangkat desa kini memiliki alat dan pemahaman untuk mengelola aset desa dengan lebih baik dan lebih transparan. Meskipun tantangan infrastruktur dan teknologi masih menjadi hambatan, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan rekomendasi dan kebijakan yang telah disarankan. Oleh karena itu, diharapkan pendampingan semacam ini dapat terus dilakukan, baik di Desa Cibugel maupun di desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adheitya Widaniyansyah, A., Martiningsih, R. S. P., and Suryantara, A. B. (2024). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Desa Kekerri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(3), 527–537. <https://doi.org/10.29303/risma.v4i3.1277>
- Arfah, E. A., S, S., Basalamah, I., Murniati, S., and Herlina, H. (2025). Pengelolaan Aset Desa Melalui Bumdes Lasamallangi Sebagai Sumber Pendapatan yang Produktif. *Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 339–347.



- <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i2.7180>
- Arifin, F. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Desa (Optimization of Village Financial and Asset Management in Order to Increase the Effectiveness of Village Government). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i1.3397>
- Biswan, A. T. (2024). *Manajemen Aset (Strategi, Perencanaan, dan Pengambilan Keputusan pada Sektor Publik)*. Unit Penerbitan PKN STAN.
- Friyanto, and Haritsar, Y. (2023). Analisis Pemanfaatan Aset Desa (Studi pada Desa Dukuh, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). *Akademika*, 21(2), 14–25. <https://doi.org/10.51881/jak.v21i2.42>
- Hidayah, L. N., K.M., L. F., Habibi, A., Pratama, A. A., Nasution, B. H., and Rini, Y. S. (2022). Pengolahan Data Aset Desa di Latukan dengan Menggunakan Aplikasi Sipades. *Abdimasmuhla*, 3(2).
- Hidayat, R., and Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “Sipades” di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat*, 8(2).
- Kushartono, T., Rohayatin, T., Kurnia, D., Wulandari, W., and Munawaroh, S. (2022). Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 451. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i3.12963>
- Lestari, A., Muthalib, A. A., and Hasnita, N. (2024). Analisis Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah Kota Kendari. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 7(19), 1–9.
- Maarif, M. S., Sukmana, H., Studi, P., Publik, A., Sidoarjo, U. M., Studi, P., Publik, A., and Sidoarjo, U. M. (2024). Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (Studi pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Candi. *UMSIDA Preprints Server*, 1–12.
- Maletič, D., de Almeida, N. M., Gomišček, B., and Maletič, M. (2023). Understanding Motives for and Barriers to Implementing Asset Management System: an Empirical Study for Engineered Physical Asset. *The Management of Operations*, 34(15). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09537287.2022.2026672>
- Marsus, S., Sitanggang, A. D. N., Adhi, A. P., and Mardhana, I. W. (2019). Pendampingan Tata Kelola Keuangan, Aset, dan Pajak Tiga Desa di Kabupaten Bogor. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1072>
- Novita, T. (2020). *Strategi Optimalisasi Kekayaan Negara dan Lelang*. Artikel KPKNL Serang. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-serang/baca-artikel/13520/Strategi-Optimalisasi-Kekayaan-Negara-dan-Lelang.html>
- Novriansa, A., Muthia, F., Aryanto, A., and Wahyudi, T. (2023). Pengelolaan Aset Desa: Pelatihan Kepada Aparatur Pemerintah Desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i1.41565>
- Nugroho, H. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 119–124. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1150>
- Prayitno, D. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), 78–82. <https://doi.org/10.35326/jiam.v4i2.1300>
- Rachman, D. S. M., Saputra, Y. J., and Said, H. E. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Desa



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. *Sigma: Journal of Economic and Business*, 7(2), 73–86.

Tyler, J. E. (2016). Asset Management the Track Towards Quality Documentation. *Records Management Journal*, 27(4). <https://doi.org/10.1108/RMJ-11-2015-0039>